

**INTEGRASI SIKAP SPIRITUAL DAN SIKAP SOSIAL  
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS  
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA SISWA  
KELAS VIII SMP CITRA BAKTI**

oleh

**Pelipus Wungo Kaka**

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Citra Bakti

[filipwungokaka@gmail.com](mailto:filipwungokaka@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan sikap spiritual dan sikap sosial dalam perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis Kurikulum Merdeka Belajar, penerapan sikap spiritual dan sikap sosial dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis Kurikulum Merdeka Belajar, dan hambatan-hambatan yang dihadapi guru bahasa Indonesia dalam mengintegrasikan sikap spiritual dan sikap sosial dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Subjek dalam penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia di kelas VIII SMP Citra Bakti. Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, klasifikasi data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi pengintegrasian sikap spiritual dan sikap sosial dalam perencanaan pembelajaran terletak atau ditunjukkan pada komponen tujuan dan langkah-langkah pembelajaran, (2) implementasi pengintegrasian sikap spiritual dan sikap sosial dalam pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan cara memberikan motivasi/dorongan, peringatan, arahan, teguran, penugasan, dan penguatan kepada siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran, (3) hambatan-hambatan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pengintegrasian sikap spiritual dan sikap sosial dalam pembelajaran bahasa terletak pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Hambatan dalam perencanaan, yaitu guru mengalami kesulitan dalam menentukan KD dari KI 1 dan KI 2 untuk diintegrasikan ke KD dari KI 3 dan KI 4 karena tidak adanya pedoman yang pasti. Hambatan dalam pelaksanaan, yaitu guru mengalami kesulitan mengimplementasikan pengintegrasian sikap spiritual dan sosial dalam kegiatan pembelajaran karena harus menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda.

Kata kunci : *Sikap Spiritual, Sosial, Pembelajaran Bahasa Indonesia, Kurikulum Merdeka Belajar*

**INTEGRATION OF SPIRITUAL ATTITUDE AND SOCIAL  
ATTITUDE IN LEARNING INDONESIAN LANGUAGE BASED  
ON INDEPENDENT CURRICULUM LEARNING TO STUDENTS  
CLASS VIII SMP CITRA BAKTI**

**Abstract**

*The purpose of this study was to describe and analyze the application of spiritual attitudes and social attitudes in planning Indonesian language learning based on the*

*Independent Learning Curriculum, the application of spiritual attitudes and social attitudes in the implementation of Indonesian language learning based on the Merdeka Learning Curriculum, and the obstacles faced by Indonesian language teachers in integrate spiritual attitudes and social attitudes in learning Indonesian. The subjects in this study were Indonesian language teachers in class VIII SMP Citra Bakti. This research was designed in the form of a qualitative descriptive research. The data in this study were collected using the methods of documentation, observation, and interviews. The data were analyzed in three stages, namely data reduction, data classification, and drawing conclusions. The results showed that (1) the implementation of the integration of spiritual attitudes and social attitudes in learning planning is located or shown in the components of the objectives and learning steps, (2) the implementation of the integration of spiritual attitudes and social attitudes in the implementation of learning is carried out by providing motivation/encouraging, warnings, directions, reprimands, assignments, and reinforcement to students when participating in learning activities, (3) the obstacles faced by teachers in implementing the integration of spiritual attitudes and social attitudes in language learning lie in the planning and implementation of learning. Barriers in planning, namely teachers have difficulty in determining KD from KI 1 and KI 2 to be integrated into KD from KI 3 and KI 4 because there are no definite guidelines. Obstacles in implementation, namely teachers have difficulty implementing the integration of spiritual and social attitudes in learning activities because they have to face different student characters.*

*Keywords: Spiritual Attitude, Social, Indonesian Language Learning, The Independent Learning Curriculum.*

## 1. PENDAHULUAN

Tujuan yang terkandung dalam Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya yaitu kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan ketrampilan. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan 3 berdasarkan kurikulum yang sedang berjalan yang bertujuan sebagai kontrol agar tujuan

pendidikan secara nasional dapat terwujud dengan baik. Kurikulum Merdeka Belajar secara terbatas mulai dilaksanakan tahun 2013 pada sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan secara selektif. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya untuk merespon berbagai tantangan-tantangan internal dan eksternal. Titik tekan pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan

tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Oviana (2013) menyatakan bahwa karakteristik Kurikulum Merdeka Belajar antara lain: mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreatif, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari dalam masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Pada Kurikulum Merdeka Belajar, siswa tidak lagi menjadi obyek dari pendidikan, tapi justru menjadi subjek dengan ikut mengembangkan tema dan materi yang ada. Kompetensi sikap spiritual dan sosial dalam setiap kompetensi dasarnya tidak memiliki materi pokok yang diberikan dalam pembelajaran, tetapi diajarkan secara *indirect learning*. Setiap guru yang

mengimplementasikan Kurikulum merdeka belajar merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai upaya mengembangkan kurikulum dari yang sudah ada sebelumnya. Lahirnya kurikulum ini adalah hasil dari fenomena pandemi COVID-19 yang menyebabkan proses pembelajaran mengalami banyak kendala sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi satuan pendidikan. Menurut Buku Saku Kurikulum Merdeka, Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten belajar akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk menguatkan kompetensi. Pada pelaksanaannya, guru lebih memiliki keleluasaan dalam memilih perangkat mengajar sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

Selain itu, pendapat lain menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian Kurikulum

Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang dalam proses pembelajarannya mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Artinya para peserta didik bisa memilih pelajaran apa saja yang diinginkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim sebagai bentuk evaluasi perbaikan Kurikulum 2013.

### **Karakteristik Kurikulum Merdeka Belajar**

Pengembangan kurikulum merdeka belajar dilakukan dengan lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, terdapat karakteristik khusus yang digunakan dalam kurikulum merdeka belajar, antara lain:

1. Pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skills dan karakter sesuai profil belajar Pancasila.
2. Berfokus pada materi esensial sehingga tersedia waktu yang

cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.

3. Fleksibilitas bagi guru dalam melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

### **Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar**

#### **Pengimplementasian**

kurikulum merdeka belajar tidak serta merta dilaksanakan secara penuh dan serentak. Sesuai dengan kebijakan Kemendikbudristek, diberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar ini. Bagi satuan pendidikan yang memilih menggunakan kurikulum merdeka belajar, terdapat 3 pilihan kategori dalam mengimplementasikan kurikulum ini, di antaranya: 1) Kategori Mandiri Belajar

Kategori ini memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka

belajar, dengan tetap menggunakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan/kurikulum darurat. 2) Kategori Mandiri Berubah. Pada tahun ajaran 2022/2023, satuan pendidikan mulai menerapkan kurikulum merdeka belajar, menggunakan perangkat ajar yang disediakan dalam PMM sesuai jenjang satuan pendidikan yaitu perangkat ajar untuk PAUD, kelas I, kelas IV, kelas VII, dan kelas IX. 3) Kategori Mandiri Berbagi. Satuan pendidikan dipersilakan untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar diikuti dengan pengembangan mandiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), kelas I, kelas IV, kelas VII, dan kelas IX mulai tahun ajaran 2022/2023.

Keunggulan Kurikulum Merdeka Belajar. Dilansir dari Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka, keunggulan yang didapatkan dengan menggunakan kurikulum merdeka belajar antara lain sebagai berikut. 1) Materi yang disampaikan dan dipelajari menjadi

lebih sederhana, mendalam, dan berfokus pada materi yang esensial. Hal ini tentu membuat peserta didik dapat belajar secara lebih dalam tanpa diburu-buru oleh waktu. 2) Guru lebih merdeka karena bisa mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. 3) Sekolah memiliki hak dan wewenang dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik. 4) Karena bersifat lebih relevan dan interaktif, proses pembelajaran lebih memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dan dapat mengeksplorasi isu-isu aktual.

Sebagai bentuk nyata implementasi dari kurikulum merdeka belajar, salah satunya adalah kegiatan presentasi yang bisa melatih rasa percaya diri dan kemampuan berbicara di depan umum bagi siswa. Nah, untuk bisa menciptakan presentasi yang menarik dan informatif, peserta didik mungkin memerlukan template power point gratis yang akan membuat suasana presentasi semakin hidup dan interaktif. Selain itu tentu persiapan

memahami materi merupakan hal utama yang harus diperhatikan.

Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam satu tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler/mingguan.

Pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui tiga tahapan berikut: 1) Asesmen diagnostic. Guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. 2) Perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan. 3) Pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru

akan mengadakan asesmen formatif secara berkala, untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran, jika diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa sebanyak 144 sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Kabupaten Ngada telah menjalankan Kurikulum Merdeka Belajar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PK Kabupaten Ngada, Drs. Vinsensius Milo, M.M., ketika dihubungi media ini pekan lalu.

“Kurikulum Merdeka Belajar sudah diimplementasikan oleh 144 Sekolah di bawah naungan dinas dan selalu dipantau, juga didampingi khusus oleh para pengawas demi menyukseskan program kementerian ini Penerapan kurikulum merdeka belajar di SMP Citra Bakti, terbatas pada kelas VIII. Oleh karena kelas VIII SMP Citra Bakti telah

menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar, peneliti mengambil subjek penelitian pada siswa kelas VIII SMP Citra Bakti. Dari hasil observasi awal di SMP Citra Bakti diperoleh informasi bahwa guru-guru yang ada di SMP Citra Bakti, khususnya guru kelas VIII telah mendapat pelatihan terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Pelatihan itu diberikan sebelum guru menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran di kelas. Dengan bekal pelatihan itu, guru diharapkan dapat menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah. Beranjak dari latar belakang pendidikan peneliti adalah pendidikan bahasa, maka peneliti memfokuskan penelitian pada guru bahasa Indonesia kelas VIII SMP Citra Bakti terkait dengan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar.

Kurikulum Merdeka Belajar membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan siswa yang

beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Dari hasil wawancara dengan guru bidang studi bahasa Indonesia kelas VIII, diperoleh informasi bahwa dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, KI-1 yaitu sikap spiritual dan KI-2 yakni sikap sosial terintegrasi dalam KI-3 dan KI-4, baik yang tersusun dalam perencanaan yang dalam hal ini rencana pelaksanaan pembelajaran maupun dalam pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan tabel 4.1, dalam dokumen RPP bahasa Indonesia kelas VIII SMP Citra Bakti yang dibuat oleh subyek peneliti ditemukan satu kegiatan pembelajaran sebagai wujud implementasi pengintegrasian sikap spiritual dan sosial, yaitu guru menuliskan rumusan tujuan pembelajaran untuk mengembangkan sikap spiritual dan sosial siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengembangan sikap

spiritual dan sosial dalam RPP masih sangat minim dan belum sesuai dengan keinginan Kurikulum Merdeka Belajar, sebab Kurikulum Merdeka Belajar secara tidak langsung meminta agar guru merancang RPP yang didalamnya terdapat pengembangan sikap spiritual dan sosial dalam kegiatan pembelajarannya. Berdasarkan identifikasi RPP bahasa Indonesia terdapat tiga bab yang di ajarkan di semester genap, hanya satu RPP yang memiliki tujuan kompetensi sikap spiritual dan sosial. Dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan tidak optimalnya pelaksanaan pembelajaran. Alasannya adalah RPP dibuat untuk dijadikan panduan dalam mengajar oleh guru. Apabila panduannya tidak sesuai, maka tujuan kegiatan pembelajaran tidak dapat tercapai seutuhnya. Dengan kata lain RPP bahasa Indonesia tersebut perlu diperbaiki dan dilengkapi terutama pada sikap spiritual dan sosial agar menjadi RPP bahasa Indonesia yang baik, yang dapat dijadikan panduan dalam mengembangkan sikap

spiritual dan sosial siswa. Kondisi ketidaksesuaian ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya, yaitu: keterbatasan waktu dalam memahami berbagai aturan dan konsep Kurikulum Merdeka Belajar dan implementasinya, dan kurangnya pengalaman dan kreatifitas subyek peneliti yang menyebabkan penyusunan RPP bahasa Indonesia menjadi tidak optimal.

Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar didasarkan pada fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita, yakni akhlak generasi muda yang semakin brutal, tidak jujur, tidak disiplin, kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Dunia pendidikan ataupun persekolahan kita saat ini, tidak mengajak anak didik untuk berpikir eksploratif dan kreatif. Seluruh suasana pembelajaran yang dibangun adalah penghafalan, tanpa pengertian yang memadai. Adapun bertanya apalagi berpikir kritis praktis adalah tabu atau “pamali”. Siswa tidak

dididik, tetapi dilatih, ditatar, dibekuk agar menjadi penurut, tidak jauh berbeda dari pelatihan binatang-binatang “pintar dan terampil” dalam sirkus. Suasana pembelajaran yang “salah urus” semacam itu, telah membuat cakrawala berpikir siswa menyempit dan mengarah pada sikap-sikap fasisme, bahkan menyuburkan mental penyamun, perompak, penggusur, koruptor yang menghambat kemajuan bangsa. Erat berhubungan dengan itu, timbullah suatu ketidakwajaran dalam relasi sikap terhadap kebenaran. Mental membual, berbohong, bersemu, berbedak, dan bertopeng, seolah-olah semakin meracuni kehidupan kultural bangsa. Kemunafikan merajalela. Kejujuran dan kewajaran dikalahkan. Keserasian antara yang dikatakan dan yang dikerjakan semakin timpang.

Sikap-sikap fasis yang menafikkan keluhuran akal budi, bahkan makin menjauhkan diri dari perilaku hidup yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tampaknya sudah menjadi fenomena yang mewabah dalam masyarakat kita. Maraknya fenomena dan

perilaku anomali semacam itu, disadari atau tidak, merupakan imbas dari sistem pendidikan yang telah gagal dalam membangun generasi yang utuh. Selama menuntut ilmu di bangku pendidikan, siswa yang baik senantiasa dicitrakan sebagai “anak mami” yang selalu mengamini semua komando gurunya. Mereka ditabukan untuk bersikap kritis, berdebat, dan bercurah pikir. Akibatnya, mereka tampak begitu santun di sekolah, tetapi menjadi liar dan bringas di luar tembok sekolah. Anak-anak bangsa yang tengah gencar memburu ilmu di bangku pendidikan (hampir) tidak pernah dididik secara serius dalam menumbuhkembangkan sikap spiritual dan sosialnya. Ranah sikap spiritual dan sosial yang amat penting peranannya dalam melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia tinggi, justru dikebiri dan dimarginalkan. Kebijakan dan kurikulum pendidikan kita belum memberikan ruang dan waktu yang cukup berarti untuk memberikan pencerahan spiritual siswa. Yang lebih memprihatinkan, guru sering terjebak pada situasi rutinitas

pembelajaran yang kaku, monoton, dan menegangkan lewat sajian materi yang lebih mirip orang berkhotbah, indoktrinasi, dan “membunuh” penalaran siswa yang dikukuhkan lewat dogma-dogma dan mitos-mitos.

Idealnya, pendidikan harus mampu memberikan pencerahan dan menumbuhkan sikap spiritual kepada siswa, sehingga mereka mampu bersikap responsif terhadap segala persoalan yang tengah dihadapi masyarakat dan bangsanya. Melalui pencerahan yang berhasil ditimbanya, mereka diharapkan dapat menjadi sosok spiritual yang memiliki apresiasi tinggi terhadap masalah kemanusiaan, kejujuran, demokratisasi, toleransi, dan kedamaian hidup. Kita membutuhkan sosok manusia yang memiliki sikap spiritual dan sosial yang dapat menciptakan damai di tengah berkecamuknya kebencian, yang menawarkan pengampunan bila terjadi penghinaan. Beranjak dari fenomena itulah, betapa pentingnya menumbuhkan sikap spiritual dan sosial dalam diri siswa. Oleh karena

itulah pemerintah merancang Kurikulum Merdeka Belajar sedemikian rupa untuk meningkatkan sikap spiritual dan sosial siswa dalam menghadapi lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Salah satu upayanya ialah dengan mengintegrasikan sikap spiritual dan sosial dalam kegiatan pembelajaran.

Alur pembelajaran yang menerapkan pendekatan *scientific* dapat membawa siswa menjadi subjek pembelajaran melalui praktik langsung. Pendekatan *scientific* yang tercermin dalam kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, menyajikan, dan mengomunikasikan dapat mengubah pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Alur pembelajaran tersebut diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna sekaligus menanamkan nilai-nilai sikap baik spiritual maupun sosial.

Saat ini di Indonesia tengah diberlakukan tiga kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yakni Kurikulum 2013,

Kurikulum 2013 yang Disederhanakan, dan Kurikulum Merdeka. Ketiga kurikulum tersebut dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sama sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berbeda dengan Kurikulum 2013 yang belum melabeli profil murid yang akan dibangun, pada Kurikulum Merdeka tujuan pendidikan yang akan dituju diberi label oleh pemerintah sebagai Profil Pelajar Pancasila dengan enam ciri utama yang konon katanya dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional.

Keenam ciri utama tersebut yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan, kreatif.

Dengan demikian secara esensial, Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka dikembangkan untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila, dampaknya suasana dan proses pembelajaran yang terjadi berdasarkan ketiga kurikulum tersebut mesti holistik mengembangkan seluruh aspek kompetensi murid yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, pada Kurikulum 2013, pemerintah menetapkan Kompetensi Inti Sikap Spiritual, Kompetensi Inti Sikap Sosial, Kompetensi Inti Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan yang memiliki fase satu tahun, artinya setiap kelas per tahun memiliki kompetensi inti masing-masing sesuai tahap perkembangan diri murid. Untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian, pada Kurikulum 2013, pemerintah menetapkan Kompetensi Dasar Sikap Spiritual dan Sosial

untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; Kompetensi Dasar Pengetahuan; dan, Kompetensi Dasar Keterampilan.

Karena memiliki Kompetensi Dasar Sikap, untuk kedua mata pelajaran tersebut, kegiatan pembelajaran sikap dilakukan secara langsung mengacu kepada kompetensi dasar, sedangkan mata pembelajaran selain kedua mata pelajaran tersebut melakukan kegiatan pembelajaran sikap secara tidak langsung antara lain melalui pembiasaan dan mengaitkan topik pengetahuan dengan nilai-nilai sikap yang relevan. Pembelajaran sikap dilakukan pada berbagai kegiatan kurikuler yang relevan dengan beragam teknik tidak dibatasi hanya dengan pembelajaran berbasis proyek sebagaimana pada Kurikulum Merdeka dan pembudayaan pada ekosistem sekolah. Nilai-nilai sikap yang dikembangkan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Pada Kurikulum Merdeka, pemerintah

tidak menetapkan Kompetensi Inti, namun menetapkan Capaian Pembelajaran (CP) yang memiliki fase baragam: 1 tahun untuk SMA Kelas X, 2 tahun untuk jenjang SD dan SMA Kelas XI dan Kelas XII berada pada fase yang sama, dan 3 tahun untuk SMP. Berbeda dengan rumusan Kompetensi Inti, rumusan CP berupa deskripsi seluruh aspek kompetensi yang harus dicapai murid pada saat murid mencapai fase tertentu. Dengan demikian mestinya CP menggambarkan berbagai aspek kompetensi baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang akan dibangun dalam aktivitas pembelajaran dan akan diukur pencapaiannya melalui penilaian.

Mudah-mudahan CP telah dikonstruksi dengan menggunakan formulasi perumusan standar untuk setiap mata pelajaran sehingga diperoleh CP yang benar, mudah dipahami, dan mudah dijabarkan ke tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan penilaian. Namun jika CP masih eror konstruksi, eror pola, dan eror substansi perilaku

kompetensi, maka pada praktiknya tidak akan ditemukan keselarasan dan harmoni antara CP, tujuan pembelajaran, pembelajaran, dan penilaian. Ketidaksiharasan ini merupakan penyakit akut dalam setiap implementasi kurikulum. Selain itu, dalam perspektif makna dan peran standar nasional pendidikan, mestinya CP bukan ayat pada kitab suci yang dikunci dan tidak bisa diubah, namun bersifat dinamis sehingga sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan CP, dengan syarat dan ketentuan selama CP yang dikembangkan sekolah melampaui CP versi pemerintah.

Pada Kurikulum Merdeka, pemerintah tidak menetapkan Kompetensi Dasar. Namun memberi ruang kepada guru untuk mengembangkan tujuan pembelajaran sebagai jabaran teknis dan detil dari CP. Kebijakan ini perlu diacungi jempol kerana menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menjadikan guru tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum, namun sekaligus berperan sebagai

pengembang kurikulum. Agar niat baik tidak bertepuk sebelah tangan, pemerintah dan pihak relavan perlu memberikan berbagai pertolongan kepada guru agar mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang benar, dapat diimplementasikan dalam pembelajaran, dan dapat diukur proses dan pencapaiannya. Spirit guru sebagai pengembang kurikulum sebenarnya merupakan spirit dari Kurikulum 2013, namun spirit ini belum berjalan. Spirit ini secara pilosofis bisa dilihat dari makna dan peran Kompetensi Dasar yang sebenarnya bisa dikembangkan oleh sekolah selama melampaui Kompetensi Dasar versi pemerintah. Lalu bagaimana dengan paradigma pembelajaran? Meski sebagian pihak mengklaim pembelajaran pada Kurikulum Merdeka berpusat pada murid, sedangkan Kurikulum 2013 belum berpihak pada murid. Untuk menyikapi klaim tersebut, mari kita mencermati substansi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menjadi dasar yuridis bagi Kurikulum 2013

dan Kurikulum Merdeka. Secara esensial terkait pembelajaran, Undang-undang Sisdiknas mengamanahkan kepada pendidik agar pembelajaran berkhidmat kepada murid atau berpusat kepada murid dengan cara mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Frasa peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, inilah yang menjadi esensi pembelajaran berpusat pada murid. Dengan kata lain, murid pemilik pembelajaran baik sebelum, saat, maupun setelah pembelajaran dengan berbagai teknik dan metode pembelajaran. Untuk itu, guru wajib mengenali berbagai aspek dari murid sebelum memulai pembelajaran dengan aktif melibatkan murid untuk mengenal dirinya.

Kemudian guru harus menciptakan suasana dan lingkungan pembelajaran yang mengadaptasi berbagai keberagaman murid. Juga, guru mesti piawai memfasilitasi berbagai ajang unjuk kinerja performa murid. Dengan demikian, Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka memiliki paradigma pembelajaran yang sama secara esensial. Hanya saja praktiknya yang perlu terus diperbaiki. Jadi, saya meyakini baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka memiliki spirit dan esensi yang sama: untuk mewujudkan profil pelajar sesuai tujuan pendidikan nasional yang holistik; berkhidmat kepada murid; memberi ruang dan waktu kepada guru untuk membangun proses, suasana, dan lingkungan pembelajaran agar murid aktif mengembangkan potensi dirinya dengan menggunakan berbagai teknik dan metode; dan mengadaptasi keberagaman murid. Oleh karena itu, esensi keberhasilan sebuah kurikulum bukan pada ganti menteri ganti kurikulum, namun pada bekerjanya kurikulum di nurani, pikiran, dan raga

guru, yang ditandai dengan terjadinya dan dirasakannya praktik pembelajaran dan penilaian yang efektif dan bermakna.

Tantangan dari luar adalah adanya fenomena sosial segolongan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan yang tentu tidak sesuai dengan fitrah diciptakannya manusia dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama. Ada pula segolongan manusia yang secara lisan beriman kepada Tuhan tetapi dalam kesehariannya tidak mencerminkan sebagai manusia yang beriman dengan meninggalkan konsekuensi dan kewajibannya sebagai manusia yang beriman. Bahkan banyak fenomena sosial kemaksiatan yang justru menunjukkan adanya ketidaktaatan terhadap ajaran agama dan sebaliknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka guru perlu dengan saksama mengimplementasikan pengintegrasian sikap spiritual dan sosial dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan agar siswa dapat memaknai setiap materi dan proses pembelajaran menjadi kesadaran

untuk menjadi hamba Tuhan yang taat dan sekaligus sebagai warga negara yang memiliki sikap sosial yang luhur untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat.

Dengan menumbuhkan sikap spiritual dan sosial dalam diri siswa, tujuan pendidikan nasional diharapkan dapat terwujud, yakni dapat berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Hamalik, 2005:1). Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi siswa sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang jaman (Muslich, 2007:2).

Terkait dengan betapa pentingnya peranan sikap spiritual dan sikap sosial dalam kegiatan pembelajaran, maka peneliti

mengambil penelitian yang memfokuskan pada implementasi pengintegrasian sikap spiritual dan sikap sosial dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VIII SMP Citra Bakti.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data melalui tiga tahap, yaitu (1) reduksi data; (2) klasifikasi dan penyajian data; (3) penarikan simpulan.

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dalam mengintegrasikan sikap spiritual dan sikap sosial yang dibuat oleh guru bahasa Indonesia di kelas VIII SMP Citra Bakti.

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) semester genap yang dibuat guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Hal yang menjadi fokus

peneliti adalah aspek KI-1 dan KI-2, yaitu implementasi pengintegrasian sikap spiritual dan sikap sosial yang dalam KI-3 dan KI-4 yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain dari implementasi pengintegrasian aspek sikap spiritual dan sikap sosial yang tertuang pada aspek pengetahuan dan keterampilan, tidak akan peneliti berikan perhatian. Data yang akan dideskripsikan melalui metode dokumentasi ini adalah bagaimana implementasi pengintegrasian KI-1 dan KI-2 ke dalam KI-3 dan KI-4 dalam perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam metode dokumentasi ini adalah berupa kartu data yang digunakan untuk mencatat hasil analisis RPP yang dibuat guru bahasa Indonesia dalam hal implementasi pengintegrasian sikap spiritual dan sosial dalam perencanaan pembelajaran. Penelitian ini pun juga menggunakan metode observasi langsung, yakni peneliti mengadakan pengamatan secara

langsung dalam situasi yang sebenarnya. Metode observasi yang akan digunakan adalah metode observasi partisipasi pasif karena peneliti bukan merupakan bagian dari subjek yang diteliti, namun ikut dalam kegiatan penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar tidak terjadi bias terhadap data yang ingin dikumpulkan. Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui data mengenai implementasi hasil pengintegrasian aspek sikap spiritual dan sikap sosial dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang diadakan oleh guru kelas VIII SMP Citra Bakti.

Instrumen observasi yang digunakan adalah model catatan lapangan, yaitu alat observasi yang digunakan untuk mencatat segala fenomena yang ada di lapangan atau tempat penelitian berlangsung. Dengan menggunakan instrumen catatan lapangan ini, peneliti dapat mencatat semua peristiwa yang ada di lapangan dengan apa adanya.

Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data mengenai hambatan-hambatan guru

dalam menerapkan sikap spiritual dan sikap sosial dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VIII SMP Citra Bakti. Data yang diperoleh melalui metode wawancara ini juga untuk melengkapi data yang didapat lewat metode observasi, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam. Dengan demikian, metode wawancara ini merupakan triangulasi pengumpulan data atas data observasi. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis Kebijakan. Kebijakan publik menyangkut soal isu-isu dan persoalan yang terjadi di masyarakat yang disusun (constructed) dan diterjemahkan dalam suatu keputusan, serta diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (Retnoningsih dan Marom, 2017). Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui apakah substansi kebijakan sudah mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang

mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan (Dunn, 2003). Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Duncan MacRae (Dunn, 2003) “analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik”. Lebih lanjut Suryadi dan Tilaar (1994) menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemecahan masalah kebijakan. Analisis kebijakan adalah penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok peneliti kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan

(policy information) yang selanjutnya digunakan dalam merumuskan (formulation) suatu masalah public yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur (well-structured policy problem) sehingga memudahkan untuk merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan (policy alternatives) untuk memecahkan suatu masalah kebijakan dan direkomendasikan kepada pembuat kebijakan (policy maker) serta menjadikannya sebagai basis informasi dalam proses pengambilan keputusan (Retnoningsih dan Marom, 2017). Meminjam istilah yang digunakan Parson (Parsons dan Santoso, 1919), maka dapat disimpulkan bahwa seorang analis akan bekerja dalam dua kategori luas: 1) Analisis proses kebijakan, yakni bagaimana cara mendefinisikan masalah, menetapkan agenda, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan; 2) Analisis dalam dan untuk proses kebijakan, yang mencakup kajian penggunaan

teknis analisis, riset, dan advokasi dalam pendefinisian masalah, pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasinya. Informasi yang dibutuhkan dalam proses perumusan kebijakan adalah: a) apa masalah kebijakan; b) apa hasil-hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan di masa depan; c) apa pilihan kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan hasil kebijakan yang diharapkan tersebut; d) apa hasil kebijakan yang didapat setelah diimplementasikan; e) bagaimana kinerja suatu kebijakan; f) apakah kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang dirumuskan. Untuk dapat menghasilkan informasi kebijakan tersebut tugas analisis kebijakan adalah: a) merumuskan masalah; b) membuat forecasting; c) memberikan rekomendasi; d) melakukan monitoring, dan e) melakukan evaluasi (Retnoningsih dan Marom, 2017).

Rumusan Kebijakan. Merumuskan kebijakan adalah hal terpenting dari proses membuat kebijakan publik yang berupa

rangkaian keputusan dalam menyelesaikan masalah. Anderson mengatakan bahwa perumusan kebijakan sebagai upaya untuk menjawab berbagai pertanyaan public, bagaimana alternative dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Sedangkan

pembentukan kebijakan lebih merujuk pada aspek-aspek seperti bagaimana permasalahan publik menjadi perhatian para pembuat kebijakan, bagaimana proposal kebijakan dirancang untuk problem-problem khusus, dan bagaimana proposal tersebut diambil di antara berbagai alternatif yang saling berkompetisi. Pembuatan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan (Winarno, 2002). Dari pendapat ini, rumusan kebijakan merupakan langkah awal sebagai alternative kebijakan public dalam merespon persoalan yang berada di masyarakat, dimana dalam prosesnya tidak terlepas dari unsur-unsur politik. Konsep Merdeka Belajar juga lahir dari proses politik,

dimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Meskipun rumusan kebijakan Merdeka Belajar mudah dipahami tetapi ketika di telaah lebih dalam masih terdapat beberapa temuan yang sulit untuk di implementasikan ke pendidikan di Indonesia yang memiliki permasalahan yang beragam dan berbeda-beda serta masih kurang siapnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang terlaksananya kebijakan ini.

Payung Hukum. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar". Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB) Zonasi. Ke empat program ini sejauh ini masih belum memiliki landasan hukum yang baku, sehingga penerapan di lapangan masih sering terjadi miskomunikasi antar sektor lembaga pendidikan. Landasan hukum yang digunakan masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sumber Anggaran. Dalam proses pelaksanaan kebijakan merdeka belajar pasti membutuhkan anggaran, sumber dana anggaran pendidikan berasal dari masyarakat dan pemerintah. Karena kebijakan ini belum memiliki payung hukum yang kuat dalam implementasinya, maka sumber anggaran masih belum teralokasi dengan baik dan sistematis sehingga seringkali di lapangan sekolah sebagai pengguna dari kebijakan ini, sering kali mengalami kekurangan dalam menerapkan kebijakan ini. Apalagi proses implementasi kebijakan merdeka belajar bersamaan dengan kasus pandemic Covid-19, yang menuntut semua lembaga pendidikan mampu

beradaptasi dengan pembelajaran berbasis teknologi.

Desain Kebijakan. Secara keseluruhan kebijakan merdeka belajar merupakan sebuah solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, layana pendidikan bisa di akses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terikat dengan ruang waktu, mengingat saat ini kita sudah memasuki revolusi industry 4.0 dan society 5.0. Sehingga semua layanan pendidikan harus berbasis teknologi, hal juga membantu dalam mengatasi masalah pandemic Covid-19 yang menjadi wabah penyakit se dunia. Kebijakan merdeka belajar diterapkan untuk membantu mengatasi masalah pendidikan yang sering kali terjadi berulang-ulang yang membatasi ruang gerak guru maupun murid dalam mengeskplore diri dengan banyaknya administrasi yang harus dipenuhi. Dengan kebijakan ini, diharapkan proses pembelajaran yang berada di sekolah lebih efektif dan efisien. Pendidikan Merdeka Belajar merupakan respon

Kemendikbud terhadap kebutuhan system pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dengan mengutamakan pendidikan karakter. Tujuannya agar dalam system pendidikan terutama dibidang pembelajaran, siswa dapat menguasai literasi data, lieterasi teknologi dan literasi manusia. Sehingga pendidikan di Indonesia mampu mencetak generasi unggul yang dapat bersaing secara global.

Merdeka Belajar. Seiring perkembangan zaman, pendidikan dewasa ini dipandang tidak hanya sebagai sector penyedia pelayanan umum (public goods), melainkan juga sebagai investasi produktif (productive investment) yang memacu pertumbuhan dalam berbagai bidang dan sector pembangunan di Indonesia. Pendidikan sebagai tolak ukur kemajuan bangsa dan negara, memiliki peran yang sangat strategis dan merupakan inisiator penentu kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, setiap pengelola pendidikan diharapkan mampu melahirkan output peserta didik yang memiliki keilmuan

dan keterampilan sesuai dengan harapan semua pihak. Berangkat dari hal tersebut, maka diperlukan konsepsi, kebijakan, dan program-program pendidikan yang tepat, terarah, dan aplikatif. Semangat untuk melakukan inovasi dan perubahan inilah roh pertama program merdeka belajar untuk diterapkan di sektor pendidikan Indonesia. Apalagi di era revolusi industri 4.0, sistem pendidikan diharapkan dapat mewujudkan peserta didik memiliki keterampilan yang mampu berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi (Ammas, 2021). Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merdeka belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan memilih bidang yang mereka sukai (Tinggi, 2020). Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem

Anwar Makarim ingin menciptakan suasana belajar yang happy dan kondusif bagi peserta didik. Merdeka belajar menurut Mendikbud berangkat dari keinginan agar output pendidikan menghasilkan kualitas yang lebih baik dan tidak lagi menghasilkan siswa yang hanya jago menghafal namun juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, penalaran serta pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri (Saleh, 2020). Merdeka belajar dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang diungkapkan oleh Agustinus Tanggu Daga dari beberapa literatur diartikan sebagai merdeka berpikir, merdeka berinovasi, merdeka belajar mandiri dan kreatif, dan merdeka untuk kebahagiaan (Daga, 2021). Konsep merdeka belajar di gagas agar peserta didik memiliki kebebasan dalam berfikir kritis dan cerdas, hal ini akan membuat peserta didik untuk mengeksplorasi tentang bagaimana proses Pendidikan yang di maksud oleh Ki Hadjar Dewantara dalam mengimplementasikan Ing Ngarso

Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani dalam system Pendidikan di Indonesia saat ini dengan mengedepankan keterbukaan dalam berfikir. Jika kebebasan belajar terpenuhi maka akan tercipta pembelajaran mandiri dan disebut sekolah mandiri. Ini mengingatkan kita pada seorang penulis Paolo Freire, seorang pendidik Brazil dari Recife University. Sebagai mahasiswa hukum, ia juga mempelajari filsafat dan psikologi dalam bahasa. Meskipun dia lulus sebagai pengacara, dia tidak pernah benar-benar berpraktik di bidang itu. Sebaliknya dia bekerja sebagai guru di SMP Citra Bakti, mengajar bahasa Portugis. Ajarannya yang terkenal adalah bahwa manusia adalah tuan dari dirinya sendiri dan oleh karena itu kodrat manusia adalah bebas. Ini adalah upaya Freire untuk memanusiakan manusia. Humanisasi bisa juga berarti pembebasan atau pembebasan orang-orang dari situasi batas yang menindas mereka ingin. "Yang tertindas harus membebaskan dan membebaskan diri dari

penindasan yang tidak manusiawi dan pada saat yang sama waktu membebaskan para penindas dari penjara hati nurani yang tidak jujur menindas" (Abdul Razzak, 2020). Jika masih ada pengecualian, kebebasan dan kebebasan sejati tidak akan pernah tercapai sepenuhnya dan penuh arti. Saat ini, kebebasan pendidikan terletak pada gagasan humanisme baru (Marope, 2019). Hakikat kebebasan berpikir menurut Nadiem, harus didahului oleh guru sebelum mereka mengajarkannya kepada siswa. Nadiem menuturkan, dalam kompetensi guru di level manapun, tanpa proses penerjemahan kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Dengan adanya kebijakan merdeka belajar ini, Kemendikbud berharap agar mengaplikasikan kurikulum dalam proses pembelajaran haruslah menyenangkan ditambah dengan pengembangan berfikir yang inovatif oleh para guru, hal ini dapat menumbuhkan sikap positif siswa dalam mersepon pembelajaran. Merdeka belajar merupakan proses

pembelajaran secara alami dalam mencapai kemerdekaan berfikir dan berinovasi di bidang pendidikan. Esensi merdeka belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, mandiri yang dimaksud tidak hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan tetapi benar-benar inovasi yang dapat memajukan pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing global (Saleh, 2020). Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si dalam Seminar Nasional “Merdeka Belajar: dalam Menapai Indonesia Maju 2045” yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 10 Maret 2020 memaparkan empat program kebijakan Merdeka Belajar (Tohir, 2019) yaitu pertama, USBN diganti dengan menjadi ujian (assessment) pada tahun 2020 sesuai dengan Permendikbud No 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional ini menunjukkan

bahwa sekolah dan guru merdeka dalam menilai hasil belajar siswa; kedua, UN tahun 2021 diganti menjadi assessment kompetensi minimum dan sesuai karakter. Pada assessment ini juga ditekankan penguasaan aspek literasi dan numerisasi dengan merujuk standar Internasional; ketiga, RPP dipersingkat dan dibuat simple serta semudah mungkin; dan keempat, zonasi PPDB lebih fleksibel dengan mempertimbangkan ketimpangan akses dan kualitas sesuai daerah (Sherly et al., 2020). Menjelaskan konsep kebijakan Merdeka Belajar yang diusulkan oleh Mendikbud dan Budaya Nadiem Makarim tersebut di atas, yang menekankan pada konsep Merdeka Belajar tersebut bahwa Nadiem melakukan penilaian terobosan dalam kemampuan minimalnya, termasuk literasi, berhitung, dan survei karakter. Literasi tidak hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan bersama dengan pemahaman konsep di baliknya. Untuk kemampuan

numerik, apa itu yang dinilai bukan matematika, tetapi penilaian kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep numeric kehidupan nyata. Satu aspek yang tersisa, Survei Karakter, bukanlah ujian. Tapi mencari sejauh mana yang merupakan penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan pancasila yang dianut siswa (Mendikbud, 2019). Kebijakan merdeka belajar ini diharapkan dunia pendidikan memberikan gebrakan kebijakan yang dapat dirasakan berbagai kalangan sehingga mampu memajukan sistem pendidikan secara merata dan mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, kompetitif dan berdaya saing global (Arifin et al., 2021).

Matriks Analisis SWOT a. Faktor Internal 1) Kekuatan (Strengthneses) a) Memberikan perlindungan dan keselamatan siswa dalam proses pembelajaran di masa pandemic Covid-19. b) Proses pembelajaran bisa di akses dan dilakukan tanpa terbebani ruang dan waktu antara guru dan siswa. c) Kurikulum lebih fleksibel melalui Kepmendikbud Nomor 719 Tahun

2020. d) Dukungan penuh kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait Sarana Pembelajaran yang mudah dijangkau melalui kerjasama Mendikbud dengan penyedia layanan informasi yang tertuang dalam SE Mendikbud. 2) Kelemahan (Weakneses) a) SDM yang masih kurang menguasai teknologi informasi di masa pemberlakuan pembelajaran online di masa pandemic Covid-19. b) Siswa di pedesaan masih kesulitan dalam mengakses pembelajaran online karena sarana yang terbatas. c) Konektivitas jaringan antar daerah yang berbeda-beda sehingga akses pembelajaran sering kali tersendat. d) Keterbatasan interaksi/komunikasi antar siswa maupun guru kurang maksimal dalam proses pembelajaran. b. Faktor Eksternal 1) Peluang (Opportunities) a) Proses pembelajaran berbasis online merupakan hal baru di masa pandemic Covid-19. b) Pelaksanaan proses pendidikan lebih fleksibel. c) Kebijakan yang sangat solutif dan strategis di tengah masa pandemic Covid-19 dalam mencegah

penularannya. d) Meningkatkan kreativitas guru dalam memberikan materi yang menarik dalam proses pembelajaran. e) Tersedia berbagai informasi dan layanan pendidikan yang mendukung terlaksananya kebijakan merdeka belajar di masa pandemic Covid-19. 2) Ancaman (Treats) a) Orang tua yang kesulitan dalam membagi waktu untuk mendampingi anaknya belajar. b) Interaksi siswa dan guru yang terbatas memicu rendahnya daya tangkap siswa serta semangat belajar siswa menurun. c) Tingkat kejenuhan yang berlarut berpengaruh pada kedisiplinan dan kehadiran siswa dalam mengikuti proses pembelajaran online. d) Lingkungan belajar siswa yang berbeda memicu tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran menurun dan tidak merata. e) Kebijakan merdeka belajar belum mampu memberikan solusi bagi daerah yang tertinggal terutama masih terbatasnya akses layanan serta sarana pembelajaran yang belum memadai dan maksimal. c. Strategi Analisis SWOT 1) Strategi

Keunggulan (Advantage) a) Maksimalisasi Proses pembelajaran melalui virtual class learning/daring meskipun di masa pandemik yang mewajibkan untuk meliburkan/menutup tempat umum termasuk sekolah. Sehingga tujuan pembelajaran dan target satuan pendidikan terpenuhi. b) Mendorong segenap elemen masyarakat, siswa, guru, orang tua dapat berperan aktif dalam mendukung dan mensukseskan kebijakan pemerintah dengan bekerja dan belajar dari rumah untuk meminimalisir penularan Covid-19. c) Kebijakan merdeka belajar merupakan langkah solutif pemerintah dalam mendukung pencegahan penularan Covid-19 juga merupakan bagian dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi informasi di era revolusi industry 4.0 dan revolusi society 5.0. 2) Strategi Mobilisasi (Mobilization) a) Membantu dalam mengoptimalkan ide-ide kreatif guru untuk menyajikan materi pembelajaran melalui pemanfaatan e-

learning sehingga proses pembelajaran tetap menarik dan mudah dipahami oleh siswa ketika waktu pelaksanaannya. b) Mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis dengan mengamati lingkungan mereka belajar. c) Membantu sekolah dalam menjalin komunikasi dengan orang tua dalam memantau perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. d) Siswa memiliki kebebasan dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. 3) Strategi Investasi (Investmen) a) Penguatan SDM dan internal organisasi sebagai penyedia layanan jasa pendidikan melalui optimalisasi peran kepala sekolah maupun dewan guru dalam memberikan layanan pembelajaran serta selalu mengevaluasi setiap proses pelaksanaan pembelajaran berbasis online di masa pandemic Covid-19. b) Sekolah sebagai penyedia layanan jasa pendidikan secara aktif harus memfasilitasi siswa memanfaatkan kebijakan merdeka belajar dalam mendukung pembelajaran berbasis online atau belajar di rumah di masa pandemic Covid-19 melalui pemutakhiran data

kontak orang tua siswa dan siswa untuk memperoleh subsidi kuota internet berdasarkan Peraturan Sekjen Kemendikbud tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021. 4) Strategi Kerusakan (Demage) a) Mengakomodasi siswa yang tidak mampu melaksanakan pembelajaran online dengan mengadakan kelompok belajar di rumah siswa yang saling berdekatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan melalui pengawasan orang tua dan guru. b) Mengakomodasi siswa dengan memberikan materi take home atau jemput materi ke sekolah secara kolektif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. c) Memanfaatkan teknologi untuk memberikan materi pembelajaran seperti melalui televisi (TVRI) yang memungkinkan menjangkau siswa.

#### **4. PENUTUP**

Dari pemaparan matriks di atas, maka dapat dipahami kebijakan merdeka belajar dalam pelaksanaan pendidikan di masa pandemic Covid-19 masih menjadi sesuatu yang baru

bagi segenap penyedia jasa layanan pendidikan. Matrik analisis SWOT di atas juga menunjukkan ancaman dan kelemahan masih mendominasi kekuatan dan peluang yang ada, ketersediaan SDM, sarana teknologi informasi dan dukungan pemerintah yang berwenang masih dibenturkan dengan realitas lapangan di masyarakat yang masih gagap dalam menguasai teknologi serta keterbatasan anggaran dalam mengelola dan mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di masa pandemic Covid-19. Di lain sisi, kebijakan merdeka belajar ini juga sangat membantu dalam mengatasi masalah pendidikan ditengah pandemi Covid-19, dengan adanya kebijakan, secara tidak langsung memberikan peluang kepada semua pihak baik siswa maupun guru untuk bisa melaksanakan kemandirian dalam belajar. Mereka bisa bebas mengeksplere setiap bahan dan materi pelajaran yang saling berkaitan tanpa adanya batasan ruang tempat dan waktu. Serta meningkatkan layanan

pendidikan dalam pengembangan teknologi informasi untuk proses pembelajaran yang berkualitas. Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. selaku guru besar UNJ, menyatakan bahwa untuk mengimplementasikan program merdeka belajar perlu memahami beberapa hal yaitu: transformasi kurikulum sekolah dan pembelajaran yang terverifikasi, transformasi manajemen pendidikan nasional, dan transformasi manajemen pendidikan daerah dan otonomi sekolah. Harmonisasi kebijakan dan pengelolaan pendidikan antar-kementerian dan antara pusat dan daerah melalui penguatan presidential grip melalui National Education Council (NEC) yang bertugas menyiapkan kebijakan presiden bidang pendidikan (Sherly et al., 2020). Melihat perkembangan pendidikan yang hampir satu tahun di masa pandemi Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan dan menetapkan kebijakan merdeka belajar menjadi era baru dalam dunia pendidikan. Peserta didik pada satuan tingkat pendidikan dasar hingga

pendidikan tinggi harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi baru dalam proses pembelajaran di era merdeka belajar saat ini. Kondisi pandemi Covid-19 memiliki dampak dalam merekonstruksi pendidikan untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran secara tidak langsung melalui media online dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. Proses pembelajaran melalui media online memberikan paradigma dan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang, mengeksplorasi dan berpikir kritis serta kreatif secara mandiri dengan pembinaan dan bimbingan dari para pendidik dan tenaga kependidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Peserta didik membutuhkan bentuk pendidikan yang tepat agar mampu menyesuaikan kondisi pribadi dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pendidikan era merdeka belajar. (Ammas, 2021). Abidah mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan merdeka belajar apalagi di tengah pandemi Covid-19, sangat membantu untuk lembaga pendidikan lebih cepat

responsif dan siap dalam menjalani perubahan dan kemajuan teknologi. Sehingga proses pembelajaran akan selalu berkembang dan dinamis sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bisa menjadi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, karena di tengah pandemi Covid-19 pembelajaran tetap berjalan dengan baik bahkan belajar dari rumah dapat menciptakan keakraban bersama keluarga. Apalagi orang tua siswa dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan bisa memantau perkembangan anaknya dalam belajar (Abidah, et al., 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiman dkk., juga menunjukkan bahwa program kebijakan merdeka belajar yaitu penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) lebih singkat dan operasional serta bermuatan 4C dapat membantu guru dalam mengembangkan ideidenya dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Dengan begitu guru akan lebih fokus pada pengembangan proses pembelajarannya sehingga

siswa dapat memahami materi pembelajaran secara komprehensif karena guru sudah tidak dirumitkan dengan perangkat pembelajarannya (Sugiman et al., 2021). Aan Widiyono dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa Kampus Mengajar Perintis (KMP) merupakan salah satu bagian dari program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Program KMP itu sendiri memiliki tujuan untuk memberikan solusi bagi Sekolah Dasar yang terdampak Pandemi Covid-19 dengan memperdayakan para mahasiswa yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan sekolah dasar tersebut. Implementasi Kampus Mengajar Perintis (KMP) dilaksanakan di SDN 01 Sowan Lor terbukti dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik seperti meningkatnya minat belajar, meningkatnya kemampuan literasi terpadu dan numerasi. Selain itu, manfaat bagi para mahasiswa diantaranya dapat

memberikan pengalaman mengajar secara langsung sehingga dapat mengembangkan kemampuan interpersonal dan kepemimpinan yang dimiliki (Widiyono, et al., 2021). Program KMP ini memberikan peningkatan efektivitas proses pembelajaran, karena mahasiswa sebagai asisten mengajar dapat membantu guru dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami dalam proses pembelajaran seperti adaptasi penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran dan pemanfaatan aplikasi dalam menunjang pembelajaran daring. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyida Nurul Anwar di SD Muhammadiyah 1 Padas. Dalam penelitian ini dikatakan jika dengan adanya program KMP, para tenaga pendidik di sekolah sangat terbantu dalam pembuatan media ajar dan bahan ajar sesuai kurikulum dengan pemanfaatan teknologi. Selain itu, tata kelola administrasi sekolah lebih tertata dengan rapi dan para guru lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam mengajar karena merasa terbsntu

dengan mahasiswa untuk dijadikan teman diskusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari adanya pandemi (Anwar, 2021). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Aan Widiyono dan Izzah Millati, dalam perspektif merdeka belajar di era 4.0 peranan teknologi pendidikan sangatlah berpengaruh dalam hal memberikan kemudahan dalam menjalankan program merdeka belajar secara nyata, tidak sekedar pada perencanaan ataupun proses tetapi pada tataran pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, beserta tahap penilaian. Peranan teknologi pendidikan dalam perspektif merdeka belajar di era 4.0 sangatlah urgen bagi guru dalam memahami hakikat dari teknologi pendidikan itu sendiri, para guru tidak sekedar dapat mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai sebuah perangkat, mesin, computer ataupun artefak lainnya, tetapi teknologi pendidikan memberikan pengertian tentang sistem serta proses yang mengarah pada hasil yang di inginkan, sesuai terhadap kebijakan program baru “merdeka belajar di era 4.0” seperti

terhadap wilayah kemampuan yang mencakup: literasi, numerasi dan survey karakter. Pembelajaran diharapkan bisa berjalan dengan efektif, efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat, lebih bermakna untuk peserta didik (Widiyono dan Millati, 2021). Dari penelitian ini bisa kita pahami, bahwa dengan adanya kebijakan merdeka belajar, mutu pembelajaran di sekolah mengalami peningkatan yang signifikan dan memiliki efek yang sangat baik bagi perkembangan metode pembelajaran yang berkualitas. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Adnyani, dengan adanya kebijakan merdeka belajar, proses pembelajaran bisa dilakukan dimana saja secara efektif dan efisien selama memenuhi kelengkapan alat yang menunjang proses pembelajaran itu sendiri. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa Penerapan Media Pembelajaran sains “Merdeka Belajar” pada anak usia dini era belajar dari rumah di TK Werdi Kumara Punggul, sudah berkembang dengan baik, sehingga secara menyeluruh pembelajaran sains

sangat diminati anak, walaupun hampir sama dalam hal melakukan permainan. Pada saat kegiatan, guru tidak membatasi gerak anak bertujuan agar anak merasa nyaman dalam beraktivitas. Kegiatan belajar bermain sains anak untuk membantu perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan (Adnyani, 2021). Kebijakan merdeka belajar juga sangat membantu dalam system pendidikan saat ini, dimana di tengah masa pandemic Covid-19 yang mengharuskan belajar dari rumah, merdeka belajar memberikan ruang yang tidak terbatas ruang dan waktu dalam melakukan proses pembelajaran dilakukan secara daring (online). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zaenab, adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa pembelajaran daring yang jalankan selama pandemi Covid-19 dengan kolaborasi Zoom dan WA Group sebagai potret merdeka belajar di masa New Normal pada kelas III SMP Citra Bakti Tahun Pelajaran

2021/2022 berjalan cukup lancar sebagai salah satu media alternatif pembelajaran pengganti pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas sekaligus memberikan gambaran perihal potret merdeka belajar sebagai suatu inovasi dan kreatifitas metode pembelajaran yang dirumuskan penulis agar tujuan pembelajaran bisa sukses dan lancar di masa pandemi Covid-19 (Zaenab, 2021). Hal ini juga diperkuat oleh Ela Istikhoirini yang melakukan penelitian tentang pembelajaran daring melalui aplikasi Edmodo, menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan edmodo dapat dikatakan efektif. Efektifitas dilihat dari respon dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika, sehingga pemanfaatan penggunaan edmodo dalam proses pembelajaran daring dalam era merdeka belajar di masa pandemi efektif untuk digunakan (Istikhoirini, 2021). Dengan adanya program merdeka belajar di tengah pandemic Covid-19 juga memberikan ruang lebih besar kepada keluarga dalam mengoptimalkan fungsinya (fungsi

kuantitatif, fungsi selektif, dan fungsi pedagogis) untuk memberikan akses serta lingkungan belajar yang kondusif bagi anaknya dalam pengembangan kompetensi anak dirumah (Sakti dan Darsim, 2021). Dari pemaparan data di atas, kebijakan merdeka belajar memiliki dampak yang sangat baik kepada guru, karena peran guru sebagai penggerak dalam pendidikan bisa menjadi lebih leluasa dalam mengeksplor kemampuannya dalam mendidik dan menciptakan generasi bangsa yang berkualitas sesuai dengan program pemerintah, yaitu menjadi bangsa yang unggul di tahun 2045. Dengan adanya kebijakan merdeka belajar, peserta didik mampu mandiri sesuai dengan aspek profil pelajar Pancasila yang mengharuskan peserta didik untuk bernalar kritis, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebhinnekaan global, dan mandiri, sehingga peserta didik terdorong dalam meningkatkan prestasi akademiknya. Pembelajaran merdeka menciptakan peserta didik tidak hanya mengetahui pembelajaran tetapi memiliki kemampuan

menganalisis dan penalaran yang tinggi dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan, selain itu, guru sebagai penggerak hanya berperan menjadi pembimbing dan pelatih bagi peserta didik dalam belajar (Sibagariang et al., 2021). Selain itu, agar guru dan siswa lebih memaknai merdeka belajar ini baik secara konsep dan implementasinya, perlu dilakukan pelatihan bagi para guru, pemberian pemahaman dan motivasi bagi para siswa, kerjasama pemerintah dengan institusi sekolah dan stakeholders secara terarah dan sistematis untuk mewujudkan capaian yang ditinginkan dari adanya kebijakan merdeka belajar itu sendiri (Daga, 2021). Berdasarkan kajian di atas, kebijakan merdeka belajar dalam pelaksanaan pendidikan di masa pandemic Covid-19 masih menjadi sesuatu yang baru bagi segenap penyedia jasa layanan pendidikan. Dari analisis SWOT juga menunjukkan ancaman dan kelemahan masih mendominasi kekuatan dan peluang yang ada, ketersediaan SDM, sarana teknologi informasi dan dukungan pemerintah

yang berwenang masih dibenturkan dengan realitas lapangan di masyarakat yang masih gagap dalam menguasai teknologi serta keterbatasan anggaran dalam mengelola dan mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di masa pandemic Covid-19. Di lain sisi, kebijakan merdeka belajar ini juga sangat membantu dalam mengatasi masalah pendidikan ditengah pandemi Covid-19, dengan adanya kebijakan, secara tidak langsung memberikan peluang kepada semua pihak baik siswa maupun guru untuk bisa melaksanakan kemandirian dalam belajar. Mereka bisa bebas mengeksplere setiap bahan dan materi pelajaran yang saling berkaitan tanpa adanya batasan ruang tempat dan waktu. Serta meningkatkan layanan pendidikan dalam pengembangan teknologi informasi untuk proses pembelajaran yang berkualitas. Tujuan pendidikan yaitu mewujudkan murid atau peserta didik yang berfikir kritis serta memecahkan masalah, kreatif dan berinovasi, terampil

berkomunikasi dan berkolaborasi, dan berkarakter. Oleh karena itu, dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan belajar harus mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Dan guru menjadi kunci keberhasilan system pendidikan merdeka belajar, oleh sebab itu harus dapat beradaptasi terhadap sistem pendidikan yang baru agar mempunyai keterampilan dan kompetensi.

#### REFERENSI

- Abidah, A., Hidayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The impact of COVID-19 to Indonesian education and its relation to the philosophy of “Merdeka Belajar.” *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.46627/sipos.e.v1i1.9>
- A. T. Daga. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7 (3), 1075–1090.
- Abidin, Z., Rumansyah, & Arizona, K. (2020). Pembelajaran online berbasis proyek salah satu solusi kegiatan belajar

- mengajar di tengah pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 5(1), 64–70.  
<https://doi.org/10.29303/jipp.v5i1.111>
- A. Widiyono dan I. Millati. (2021). Peran Teknologi Pendidikan dalam Perspektif Merdeka Belajar di Era 4.0. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2 (1), 1–9.
- A. Widiyono, S. Irfana dan K. Firdausia. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis di Sekolah Dasar. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-Sd-An*, 16 (2).
- Aji, R. H. S. (2020). Dampak COVID-19 pada pendidikan di Indonesia: Sekolah, keterampilan, dan proses pembelajaran. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(5), 395–402.  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>
- Anderson, R. M., Heesterbeek, H., Klinkenberg, D., & Hollingsworth, T. D. (2020). How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic? *The Lancet*, 395(10228), 931–934.
- BNPB. Pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana. Pub. L. No. No. 4 Tahun 2008, 16 (2008).
- Darmadi, H. (2015). Tugas, peran, kompetensi, dan tanggung jawab menjadi guru profesional. *Jurnal Edukasi*, 13(2), 161–174.
- Hartini, T., Misri, M. A., & Nursupriah, I. (2016). Pemetaan HOTS siswa berdasarkan standar PISA dan TIMSS untuk meningkatkan mutu pendidikan. *EduMa*, 5(2), 83–92.
- Hawa, A. M., & Putra, L. V. (2018). PISA untuk siswa Indonesia. *Janacitta*, 1(1), 1–8.
- Herlambang, A. D., & Hidayat, W. N. (2016). Edmodo untuk meningkatkan kualitas perencanaan proyek dan efektivitas pembelajaran di lingkungan pembelajaran yang bersifat asinkron. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 3(3), 180–187.
- Koning, B. B., Rop, G., & Paas, F. (2020). Effects of spatial distance on the effectiveness of mental and physical integration strategies in learning from split-attention examples. *Computers in Human Behavior*, 110(March), 106379.  
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106379>
- Mahendra, Y. D., & Mariono, A. (2019). Pengembangan media e-modul berbasis aplikasi android materi komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan mata pelajaran simulasi dan komunikasi

- digital Kelas X Multimedia di SMK Negeri 1 Sooko Mojokerto. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*, 9(2), 1–9.
- Mardiana, D., & Anggraini, D. C. (2019). The effectiveness of utilising web-learning media towards Islamic education learning (PAI) outcome in the era of industrial revolution 4.0. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 8(1), 80–96.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis* (3rd ed.). SAGE.
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” perspektif aliran progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147.
- Mustakim, M., Shoffa, S., & Hidayatullah, A. (2019). Pengembangan perangkat pembelajaran blended learning berbasis Schoology untuk meningkatkan literasi digital matematika. *Jumlahku: Jurnal Matematika Ilmiah STKIP Muhammadiyah Kuningan*, 5(1), 88–99.
- Nurfaidah, S., Tambunan, A. R. S., Yonata, F., Kurniawati, D., & Lestariyana, R. P. D. (2020). International students’ perceptions of virtual service learning program amidst COVID-19 pandemic. *Journal of International Students*, 10(S3), 198–208.
- Purwanto, A. (2020). Studi eksplorasi dampak Work from Home (WFH) terhadap kinerja guru selama pandemi COVID-19. *EduPsyCouns*, 2(1), 92–100.
- Purwanto, A., Pramono, R., Ashari, M., Santoso, P. B., & Mayesti, L. (2020). Studi eksploratif dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran online di sekolah dasar. *EduPsyCouns*, 2(1), 1–12.
- Puspitasari, & Ratu, N. (2019). Deskripsi pemahaman konsep siswa dalam menyelesaikan soal PISA pada konten space and shape. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(1), 155–166.
- Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., & Xu, Y. (2020). A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: Implications and policy recommendations. *General Psychiatry*, 33(2), 1–4. <https://doi.org/10.1136/gpsych-2020-100213>
- Rundle, A. G., Park, Y., Herbstman, J. B., Kinsey, E. W., & Wang, Y. C. (2020). COVID-19-related school closings and risk of weight gain among

children. *Obesity*, 28(6), 1008–1009.  
<https://doi.org/10.1002/oby.22813>

Simatupang, N. I., Sitohang, S. R. I., Situmorang, A. P., & Simatupang, I. M. (2020). Efektivitas pelaksanaan pengajaran online pada masa pandemi COVID-19 dengan metode survey sederhana. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 13(2), 197–203.

Sintema, E. J. (2020). Effect of COVID-19 on the performance of grade 12 students: Implications for STEM education. *EURASIA: Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 16(7), 1–6.

Telaumbanua, D. (2020). Urgensi pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(1), 59–70.

Wang, Chuanyi, Cheng, Z., Yue, X., & McAleer, M. (2020). Risk management of COVID-19 by universities in China. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(36), 1–6.  
<https://doi.org/10.3390/jrfm13020036>